

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK INDONESIA

Rara Ameliona Saputri<sup>1\*</sup>, Afrijal<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

### ABSTRAK

#### ARTICLE INFO

##### Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

[rara91781@gmail.com](mailto:rara91781@gmail.com),

[afrijal@usk.ac.id](mailto:afrijal@usk.ac.id)

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat korupsi di sektor publik Indonesia melalui pendekatan kajian literatur sistematis terhadap publikasi ilmiah tahun 2021-2025. Pendekatan ini memanfaatkan teori keagenan serta perspektif tata kelola pemerintahan untuk menelaah keterkaitan antara kontrol internal, audit internal, tata kelola pemerintahan, budaya organisasi, serta penerapan transparansi digital terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal dan peran audit internal berkontribusi signifikan dalam menekan praktik korupsi, sementara pengeluaran modal dan keleluasaan (discretion) yang berlebihan cenderung meningkatkan risiko korupsi. Selain itu, budaya organisasi dengan jarak kekuasaan tinggi memperkuat kerentanan terhadap korupsi, terutama bila tidak diimbangi dengan akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat.

Faktor eksternal seperti digitalisasi, e-government, dan keterlibatan masyarakat turut menjadi elemen penting dalam memperkuat integritas sektor publik. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi kelembagaan yang terintegrasi antara pengawasan internal, transformasi budaya birokrasi, dan penguatan tata kelola digital guna menekan korupsi secara sistematis dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** korupsi, tata kelola pemerintahan, audit internal, budaya organisasi, digital governance.

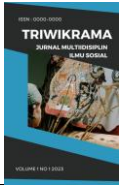
### ABSTRACT

*This study aims to analyze the factors influencing the level of corruption in Indonesia's public sector through a systematic literature review of academic publications from 2021-2025. Using the agency theory framework and governance perspective, the study explores the interrelation between internal control, internal audit, public governance, organizational culture, and digital transparency in shaping corruption levels. Findings reveal that the effectiveness of internal control systems and internal audit functions significantly reduce corruption, while excessive discretion and high capital expenditures tend to increase corruption risks. Furthermore, organizational culture characterized by high power distance fosters corruption vulnerability, especially in the absence of accountability and citizen participation. External factors such as digitalization, e-government, and public engagement also play a crucial role in strengthening public sector integrity. The study concludes that integrated institutional reforms, combining internal supervision, bureaucratic culture transformation, and digital governance, are essential for achieving a systematic and sustainable reduction in corruption.*

**Keywords:** corruption, public governance, internal audit, organizational culture, digital governance.

### PENDAHULUAN

Korupsi dalam sektor publik Indonesia terus menjadi tantangan signifikan bagi pembangunan nasional, integritas pemerintahan, dan keyakinan publik atas fungsi negara. Meskipun berbagai lembaga dan kebijakan telah diupayakan untuk pemberantasan korupsi, realitas empiris menunjukkan bahwa tingkat korupsi masih tetap tinggi dan mengalami



fluktuasi. Sebagai contoh, penelitian terkini menegaskan bahwa praktik korupsi di lembaga pelayanan publik terkait erat dengan keleluasaan (*discretion*) pejabat serta kelemahan mekanisme pengawasan internal (Yudiantari dan Yasa, 2023). Kondisi ini menimbulkan urgensi analisis sistematis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi, dengan harapan dapat mendukung desain kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti.

Secara teoritis, korupsi dapat dilihat sebagai manifestasi dari ketidakseimbangan antara kesempatan, motivasi, dan pengawasan dalam struktur organisasi publik. Kerangka keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa ketika prinsipal (dalam hal ini publik atau negara) memberi wewenang kepada agen (aparatur publik) tanpa akuntabilitas yang memadai, maka potensi penyalahgunaan muncul kuat. Penelitian di konteks Indonesia menemukan bahwa semakin kuat penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan (*good governance*) maka probabilitas korupsi menurun (Maria dan Halim, 2021). Namun demikian, tata kelola saja tidak cukup; faktor-faktor institusional, kelembagaan, dan kontekstual turut membentuk tingkat korupsi di sektor publik.

Dalam konteks Indonesia, beberapa faktor institusional telah diidentifikasi sebagai prediktor korupsi. Sebagai contoh, efektivitas kontrol internal serta fungsi audit internal terbukti menurunkan praktik korupsi di pemerintahan daerah (Shidqi dan Arfiansyah, 2025). Sebaliknya, desentralisasi yang tidak diiringi mekanisme akuntabilitas yang memadai bisa memunculkan keleluasaan yang berlebihan dan meningkatkan praktik korupsi (Shidqi dan Arfiansyah, 2025). Faktor-faktor seperti kualitas pelaporan keuangan dan penguatan sumber daya manusia juga menjadi bagian dari strategi pencegahan korupsi yang penting, namun realisasinya di lapangan masih menghadapi kendala (Yusuf dkk., 2025). Dengan demikian, kajian ini akan meninjau secara empirik bagaimana faktor-faktor kelembagaan, struktural, dan pengawasan berinteraksi dalam konteks Indonesia dan bagaimana kontribusinya terhadap tingkat korupsi di sektor publik.

Lebih lanjut, konteks Indonesia menawarkan tantangan spesifik yang memerlukan perhatian. Besarnya dana publik yang dikelola di tingkat daerah, premis desentralisasi yang memberi ruang lebih besar kepada pemerintah lokal, serta dinamika politik yang kuat dalam birokrasi publik menjadikan kerangka analisis faktor korupsi harus berbasis konteks lokal. Sebagai contoh, penelitian mengungkap bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik berpengaruh pada penurunan peluang korupsi karena mengurangi asimetri informasi antara agen dan principal (Maria dan Halim, 2021). Selain itu, teknologi informasi dan transparansi digital telah dipertimbangkan sebagai instrumen penanggulangan korupsi di Indonesia, namun implementasi dan hambatannya masih menjadi persoalan (Mabel dkk., 2025; Rahmafillah dkk., 2025). Oleh karena itu, analisis yang mempertimbangkan faktor kelembagaan tradisional dan faktor-inovatif modern seperti digitalisasi pengawasan menjadi sangat relevan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library-based research*) yang sistematis dan analitik, tidak melibatkan pengumpulan data primer, tetapi memanfaatkan literatur ilmiah yang telah diterbitkan untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan mensintesis temuan-temuan terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi di sektor publik. Penelitian ini menggunakan jenis naratif atau integratif, dengan struktur yang meliputi pemilihan sumber, analisis tematik, sintesis dan penarikan implikasi teoretis maupun kebijakan.

## 2. Sumber dan Kriteria Pemilihan Literatur

Penelitian akan menggunakan artikel jurnal *peer-review* terbitan antara tahun 2021 hingga 2025 agar *up to date*. Adapun kriteria dalam menyeleksi sumber artikel jurnal antara lain: fokus pada sektor publik, tata Kelola pemerintahan, korupsi, akuntabilitas, dan pengawasan internal di Indonesia. Selain itu, sumber artikel jurnal juga harus mengandung metodologi yang jelas, hasil empiris ataupun konseptual yang dapat dianalisis lebih lanjut terkait rangka sintesis.

Pencarian menggunakan basis data seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, serta perpustakaan universitas. Panduan literatur menyebutkan bahwa kajian literatur yang sistematis memerlukan “*defining the research boundaries and specifying key concepts, themes, and timeframes*” dalam prosesnya (Alif dan Solihin, 2023).

Setelah pencarian, dilakukan pemilahan berdasarkan judul, abstrak, kata-kunci, kemudian *full-text* dibaca untuk menentukan relevansi. Proses ini termasuk dalam langkah “*data collection through reading and creating a comparison matrix*” seperti yang dijelaskan dalam literatur metodologi (Alif dan Solihin, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil

Berdasarkan kajian literatur sistematis terhadap sumber artikel jurnal tahun 2021 hingga 2025, beberapa faktor utama telah ditemukan berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di sektor publik Indonesia. Adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

#### a. Kontrol internal dan audit internal

Sebuah studi panel terhadap 519 pemerintah daerah di Indonesia selama periode 2018-2022 menunjukkan bahwa sistem kontrol internal yang baik serta fungsi audit internal yang matang secara signifikan menurunkan tingkat korupsi publik. Sebaliknya, pengeluaran modal (*capital expenditure*) terbukti memiliki korelasi positif dengan tingkat korupsi (Shidqi dan Arfiansyah, 2025). Studi lain yang meneliti efektivitas pengendalian internal di kementerian/lembaga menemukan bahwa peran audit internal berpengaruh negatif terhadap kasus korupsi, sementara realisasi belanja anggaran secara persentase berpengaruh positif (Utomo, Hayat dan Respati, 2025). Lebih lanjut, penelitian komparatif antara pemerintah pusat dan daerah memperlihatkan bahwa sistem pengendalian internal terintegrasi (*risk management, internal audit, internal control*) berpengaruh terhadap integritas organisasi yang akan berdampak pada korupsi atau penyimpangan (Nurmalasari dkk., 2025).

#### b. Tata kelola pemerintahan (*good governance*)

Literatur menunjukkan bahwa semakin baik penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi—maka probabilitas korupsi semakin menurun. Misalnya, penelitian yang menggunakan perspektif teori keagenan menemukan bahwa *good governance* mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal sehingga kesempatan korupsi berkurang (Shidqi dan Arfiansyah, 2025).

#### c. Budaya organisasi dan jarak kekuasaan (*power distance*)

Studi terkini di Indonesia menunjukkan bahwa budaya organisasi dan jarak kekuasaan memegang peranan penting dalam korupsi birokrasi publik. Sebagai contoh, penelitian “*Organizational Culture, Power Distance and Corruption: The Mediating Role of Religiosity*” menemukan bahwa meski religiusitas memediasi hubungan budaya organisasi terhadap korupsi, hubungan langsung antara jarak kekuasaan dan korupsi tidak selalu signifikan, tetapi tetap menunjukkan bahwa struktur hierarkis (*high power distance*) berpotensi meningkatkan kerentanan korupsi (Maulidi dkk., 2024). Penelitian

lain “*Corruption Risk Management: Power Distance, Organisational Culture and Corruption*” menunjukkan, menggunakan data birokrat publik daerah, bahwa power distance dan budaya organisasi yang hierarchical memiliki korelasi positif terhadap tingkat korupsi (Maulidi dkk., 2025).

**Tabel 1.** Perbandingan Hasil *Literatur Review*

| Studi (Penulis, Tahun)                                                                                                                               | Variabel Utama                                                                                 | Metode / Data                              | Temuan Utama                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Good governance and corruption in local governments: The role of internal control and audit</i> (Shidqi dan Arfiansyah, 2025)                     | Kontrol internal, fungsi audit internal, belanja modal ( <i>capital expenditure</i> )          | <i>Panel data, fixed-effect regression</i> | Kontrol internal dan audit internal yang matang menurunkan korupsi; belanja modal memiliki korelasi positif dengan korupsi                                           |
| <i>Organizational culture, power distance and corruption: The mediating role of religiosity</i> (Maulidi dkk., 2025)                                 | Budaya organisasi, jarak kekuasaan ( <i>power distance</i> ), religiositas ( <i>mediator</i> ) | PLS-SEM                                    | Religiositas berhubungan negatif dengan korupsi; budaya organisasi memengaruhi religiositas; jarak kekuasaan tidak secara langsung berpengaruh kuat terhadap korupsi |
| <i>The Effect of the Government Internal Control System on Corruption Potential with Accountability as an Intervening Variable</i> (Sari dkk., 2024) | Sistem pengendalian internal (SPI), akuntabilitas ( <i>mediator</i> ), potensi korupsi         | Analisis jalur ( <i>path analysis</i> )    | Sistem pengendalian internal negatif berpengaruh terhadap potensi korupsi dengan akuntabilitas sebagai variabel intervening                                          |

## 2. Pembahasan

### a. Integrasi Temuan dan Konteks Kelembagaan

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa variabel kontrol internal dan audit internal memiliki peranan krusial dalam menekan tingkat korupsi di sektor publik Indonesia. Sebagai contoh, sebuah studi panel terhadap 519 pemerintah daerah menemukan bahwa fungsi kontrol internal serta kematangan audit internal secara signifikan berhubungan dengan penurunan korupsi, sedangkan belanja modal justru memperlihatkan korelasi positif terhadap korupsi (Shidqi dan Arfiansyah, 2025). Temuan tersebut menegaskan bahwa penguatan mekanisme pengawasan internal, melalui audit yang tepat waktu, sistem pengendalian internal yang terstruktur dan efektif merupakan instrumen inti dalam sistem *governance* publik yang mampu memperkecil ruang gerak bagi aktor yang memiliki kesempatan atau motivasi untuk melakukan korupsi. Namun demikian, ketika kelembagaan formal tersebut berdiri sendiri tanpa didukung oleh akuntabilitas eksternal, transparansi, dan kontrol distribusi wewenang (*discretion*) yang terkendali, maka potensi penyalahgunaan tetap tinggi.

Konteks desentralisasi di Indonesia memungkinkan pemerintah daerah memperoleh wewenang dan anggaran besar, namun tanpa mekanisme pengawasan yang memadai dan distribusi wewenang yang efektif, justru dapat menjadi kanal korupsi (Assanti, 2024). Oleh karena itu, struktur kelembagaan yang kuat tidak cukup bila hanya berbasis mekanisme internal; elemen eksternal dan distribusi wewenang perlu diintegrasikan ke dalam kerangka *governance* sehingga kontrol internal, audit, dan pembatasan diskresi secara bersinergi dapat mengurangi risiko korupsi secara lebih signifikan.

b. Peranan Budaya Organisasi dan Diskresi dalam Birokrasi

Lebih jauh, literatur menggarisbawahi bahwa faktor budaya organisasi—khususnya jarak kekuasaan (*power distance*), memegang pengaruh signifikan terhadap risiko korupsi di sektor publik. Penelitian yang berjudul “*Organizational culture, power distance and corruption: The mediating role of religiosity*” misalnya menunjukkan bahwa budaya organisasi yang bersifat hierarkis dan sistematis dengan jarak kekuasaan tinggi berkorelasi positif dengan korupsi, meskipun variabel religiositas memoderasi dampaknya (Maulidi dkk., 2025).

Dalam konteks birokrasi publik di Indonesia, di mana norma kekuasaan vertikal, loyalitas kepada atasannya, dan sedikitnya partisipasi pegawai di bawah menjadi budaya yang melekat, maka ruang bagi keputusan tertutup dan pengawasan informal yang lemah terbuka. Apabila pada saat yang sama aparat publik memiliki wewenang diskresi luas, misalnya dalam penganggaran, pemilihan kontraktor, atau pemberian layanan publik, tanpa prosedur yang jelas atau mekanisme transparansi dari masyarakat, maka kombinasi budaya organisasi permisif terhadap jarak kekuasaan dengan kelemahan kontrol internal akan memperparah risiko korupsi (Assanti, 2024). Dengan demikian, reformasi antikorupsi tidak hanya memfokuskan pada aspek prosedural dan teknis, tetapi juga harus menyentuh transformasi budaya organisasi—mengarusutamakan nilai etika publik, partisipasi rendah jarak kekuasaan (*low power distance*), serta mekanisme *rotasi dan akuntabilitas pejabat sebagai bagian dari* strategi menyeluruh.

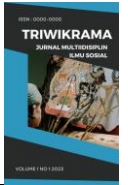
c. Faktor Masyarakat Eksternal dan Transparansi Digital

Tidak kalah pentingnya adalah peranan masyarakat eksternal serta transparansi digital dalam mempengaruhi tingkat korupsi. Data resmi menunjukkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) Indonesia pada tahun 2023 sebesar 3,92 (skala 0-5), sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya (BPS, 2023). Angka ini mencerminkan bahwa tata perilaku publik dan pengalaman masyarakat terhadap korupsi cenderung memburuk sedikit. Indikasi ini menunjukkan bahwa meskipun institusi publik melakukan reformasi internal, tanpa dukungan budaya masyarakat yang menolak korupsi serta mekanisme transparansi, seperti sistem *e-governance*, pelaporan publik, partisipasi warga dan akses informasi, efektivitas pengendalian korupsi akan terbatas. Penelitian terkini menambahkan bahwa perkembangan teknologi (misalnya *blockchain*, analitik data, sistem pelaporan elektronik) mulai memainkan peran sebagai instrumen pencegahan korupsi. Dengan demikian, integrasi antara reformasi kelembagaan internal, transformasi budaya organisasi, dan penguatan masyarakat eksternal melalui teknologi dan transparansi merupakan formula yang lebih holistik untuk menangani korupsi sektor publik Indonesia.

d. Implikasi Teoritis dan Kebijakan

Dari perspektif teoritis, temuan-kajian ini memperkuat kerangka Teori Keagenan (*agency theory*) bahwa ketika prinsipal (masyarakat/negara) memberikan wewenang kepada agen (aparatur publik) tanpa mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang





memadai, maka risiko korupsi meningkat. Namun, temuan menunjukkan bahwa perspektif budaya organisasi juga harus dilibatkan, yaitu bahwa jarak kekuasaan (*power distance*), norma profesi birokrasi, dan budaya nilai di dalam organisasi publik turut menentukan efektivitas mekanisme kontrol. Dengan demikian, teori keagenan tradisional perlu diperluas dengan penggabungan aspek budaya organisasi dan norma birokrasi. Selain itu, hasil penelitian tentang digital *governance* juga menyarankan bahwa teknologi informasi dan transparansi digital, meskipun bukan jaminan tunggal, membuka jalur baru untuk meningkatkan akuntabilitas publik (Rahmafillah dkk., 2025).

Dari sisi kebijakan, beberapa hal menjadi prioritas: pertama, memperkuat sistem pengendalian internal dan audit internal di pemerintahan daerah dan pusat sebagai mekanisme utama pencegahan korupsi; kedua, melakukan transformasi budaya birokrasi menuju akuntabilitas, inklusivitas, dan transparansi, misalnya melalui pelatihan etika, rotasi pejabat, mekanisme *whistle-blowing* yang efektif; ketiga, mengembangkan teknologi informasi dan sistem *e-governance* untuk memperkecil peluang diskresi yang tidak terkontrol dan memperkuat partisipasi masyarakat sebagai pengawas publik, dalam studi "*Digital Bureaucracy and Public Trust in Indonesia: A Governance Analysis of EGD Trends and Regional Disparities*" ditemukan bahwa meskipun peningkatan indeks *e-government* (EGDI) berdampak pada kepercayaan publik, masih terdapat kesenjangan regional yang membatasi efektivitasnya (Malizal dan Pratama, 2025). Keempat, kebijakan desentralisasi harus diiringi sistem akuntabilitas yang kuat agar wewenang lokal tidak menjadi pintu bagi korupsi, hal ini sejalan dengan literatur yang membahas bahwa mekanisme kontrol eksternal sangat penting ketika wewenang semakin desentralisasi.

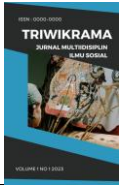
e. Keterbatasan Penelitian dan Arahan Selanjutnya

Penelitian ini berbasis kajian kepustakaan, sehingga keterbatasannya terletak pada ketergantungan terhadap literatur yang tersedia dan belum mencakup data primer terbaru secara luas. Beberapa studi masih terbatas pada unit analisis tertentu (misalnya satu provinsi atau sektor spesifik) dan belum mencakup seluruh aspek variabel seperti remunerasi aparatur publik, teknologi pengawasan, atau pengaruh globalisasi dan jaringan politik dalam korupsi. Misalnya, penelitian "*Analysis of E-Government Implementation as an Effort to Reduce Corruption in Indonesia*" menunjukkan bahwa implementasi *e-government* saja masih memberikan dampak minimal terhadap pencegahan korupsi karena regulasi dan independensi lembaga penegak masih lemah (Hadmar dan Madamang, 2025). Oleh karena itu, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan metode empiris, misalnya data panel nasional yang mencakup seluruh pemerintahan daerah Indonesia, memasukkan variabel budaya organisasi secara eksplisit, dan mengeksplorasi interaksi antar variabel seperti bagaimana budaya organisasi memoderasi hubungan antara kontrol internal dan korupsi. Selain itu, studi komparatif antara teknologi *e-governance*, *data analytics*, dan peran masyarakat (*collective action*) dalam konteks lokal Indonesia juga sangat diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan operasional.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di sektor publik Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor kelembagaan, struktural, dan kultural. Penguatan sistem pengendalian internal dan audit internal terbukti menjadi instrumen efektif dalam menurunkan risiko korupsi, terutama bila diiringi dengan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik



(good governance). Namun, budaya organisasi dengan jarak kekuasaan tinggi, lemahnya partisipasi publik, serta diskresi yang berlebihan tetap menjadi tantangan utama dalam pemberantasan korupsi. Integrasi teknologi informasi dan sistem digital (*e-governance*) membuka peluang baru untuk meningkatkan akuntabilitas, meski masih menghadapi kendala implementasi dan kesenjangan antar daerah. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilihat sebagai upaya multidimensi yang melibatkan aspek kelembagaan, budaya, dan teknologi secara bersamaan.

## 2. Saran

Upaya pemberantasan korupsi di sektor publik Indonesia perlu dilakukan secara terpadu melalui penguatan sistem pengendalian dan audit internal, reformasi budaya birokrasi, serta pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah harus menanamkan nilai etika publik, mengurangi jarak kekuasaan, dan meningkatkan akuntabilitas melalui penerapan *e-governance* dan sistem pengawasan berbasis teknologi. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu diperluas melalui kanal pelaporan dan mekanisme whistleblowing yang transparan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data empiris lintas wilayah untuk menganalisis hubungan antara pengawasan internal, budaya organisasi, dan efektivitas tata kelola digital dalam menekan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alif, M. dan Solihin, O. (2023) "Kajian Tinjauan Literatur dalam Penelitian Sosial," *Journal Signal*, 11(2), hlm. 277-297.
- Assanti, W.K. (2024) "Discretion leads to corruption in Indonesian Public Service Agency Hospitals: Governance challenges and control mechanisms," *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 10(2), hlm. 215-230. Tersedia pada: <https://doi.org/10.28986/jtaken.v10i2.1632>.
- Badan Pusat Statistik (2023) *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2023*.
- Hadmar, A.M. dan Madamang, I. (2025) "Analysis of E-Government Implementation as an Effort to Reduce Corruption in Indonesia," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 5(2), hlm. 3036-3045. Tersedia pada: <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh><https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>.
- Mabel, S.N.M., Payamta, P. dan Winarna, J. (2025) "The development of fraud prevention policies in the public sector: A bibliometric analysis," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 29(1), hlm. 119-133. Tersedia pada: <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.i>.
- Malizal, Z.Z. dan Pratama, M.A. (2025) "Digital Bureaucracy and Public Trust in Indonesia: A Governance Analysis of EGDI Trends and Regional Disparities," *Politeia : Journal of Public Administration and Political Science and International Relations*, 3(2), hlm. 100-113. Tersedia pada: <https://journal.idscipub.com/politeia>.
- Maria, E. dan Halim, A. (2021) "Public Governance dan Korupsi: Bukti Pengujian dari Indonesia Menggunakan Perspektif Teori Keagenan," *Jurnal Akuntansi*, 11(3), hlm. 223-234. Tersedia pada: <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.3.223-234>.
- Maulidi, A. Girindratama, M. W., Soeherman, B., dan Andono, F. A. (2024) "Organizational culture, power distance and corruption: The mediating role of religiosity," *The Indonesian Accounting Review*, 14(2), hlm. 203-221. Tersedia pada: <https://doi.org/10.14414/tiar.v14i2.4795>.
- Maulidi, A., Soeherman, B. dan Andono, F.A. (2025) "Corruption Risk Management: Power Distance, Organisational Culture and Corruption," *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 17(1), hlm. 152-168. Tersedia pada: <https://doi.org/10.26740/jaj.v17n1.p.152-168>.



- Nurmalasari, D., Priyarsono, D.S. dan Sari, L.K. (2025) "Do internal controls improve integrity? A comparative study of central and regional governments," *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 11(1), hlm. 139-156. Tersedia pada: <https://doi.org/10.28986/jtaken.v11i1.2038>.
- Rahmafillah, R., Putri, R.Y.A. dan Sartika, R. (2025) "The Effectives of Anti-corruption Policies in the Digital Age: A Literature Review on the Use of Technology in the Eradication of Corruption," *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), hlm. 146-150. Tersedia pada: <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v9i2.10043>.
- Shidqi, F. dan Arfiansyah, Z. (2025) "Good governance and corruption in local governments: The role of internal control and audit," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 29(1), hlm. 1-11. Tersedia pada: <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.i>.
- Utomo, W.S., Hayat, A. dan Respati, N.W. (2025) "Efektivitas Pengendalian Internal, Peran Audit Internal, Kompleksitas Instansi Dan Opini Audit Terhadap Kasus Korupsi (Studi Empiris Pada Kementerian/Lembaga Di Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.A), hlm. 264-276.
- Yudiantari, I.G.A.N. dan Yasa, G.W. (2023) "Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai Pemoderasi," *E-Jurnal Akuntansi*, 33(12), hlm. 3202-3219. Tersedia pada: <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i12.p07>.
- Yusuf, G.C. Din, M. Jurana, dan Furqan A. C. (2025) "Corruption Prevention Strategies Through Improving the Quality of Financial Reports and Strengthening Human Resources in Local Governments in Indonesia," *The Indonesian Journal of Management and Accounting*, 13(1), hlm. 49-58.